

# ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOLAKA

Sulqifly<sup>1</sup>; Surianto Ilham<sup>2</sup>; Sabarudin<sup>3</sup>

Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
Jln. Pemuda no. 339. Kolaka, Sulawesi Tenggara  
E-mail : [sulqifly181821633@gmail.com](mailto:sulqifly181821633@gmail.com) (Koresponding)

**Abstract:** Analysis of Government Agency Performance Accountability Reports at the Kolaka Regency Education and Culture Office The purpose of this study was to analyze the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) at the Kolaka Regency Education and Culture Office. The research approach used in this study is to use a qualitative approach. This research was conducted at the Culture and education office of Kolaka Regency which is located at Jalan Pemuda No. 181, Kolaka District, Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province. The time in this research was conducted from November 2024 to January 2025. . The data sources used in this study were primary data and secondary data. Data analysis was carried out using Descriptive Qualitative methods (describing and explaining) Performance accountability at the Kolaka Regency Education and Culture workplace. The study's findings indicated that the realization of performance achievements in 2023 showed that: (1) the Expected Years of Schooling target in 2023 was 13.75% while the realization was 13.95%, (2) the Average Years of Schooling target was 9.25% while the realization was 9.06%, and (3) the Percentage of Arts and Culture Centers target was 50.00% while the realization was 52.03%. In addition, the success in realizing the predetermined performance targets is inseparable from the hard work of the Service Office.

**Keywords:** *Analysis, Report Accountability, Performance*

Pemerintahan yang baik (*good governance*) harus dilandasi oleh tiga pilar utama: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Agar pemerintahan berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan harus dilibatkan secara aktif.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan untuk membuat pelaksanaan pemerintah lebih efisien, efektif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) adalah sumber utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan seberapa baik dan buruk pelaksanaan tugas utama dan fungsinya untuk mncapai tujuan. Kinerja tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka digambarkan dalam tingkat pencapaian sasaran melalui berbagai

kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

## METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berarti hanya menggunakan satu variable dan tidak melakukan perbandingan atau hubungan antara variabel. Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki kondisi objek alamiah. Jenis penelitian ini berbeda dengan eksperimen, di mana peneliti bertindak sebagai instrument utama. Teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), data tidak seperti generalisasi, penelitian kualitatif menekankan pentingnya.

## HASIL

Untuk memenuhi visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka, sejumlah tujuan telah dilakukan, salah satunya adalah mewujudkan Pendidikan berkualitas tinggi dan murah bagi masyarakat Kabupaten Kolaka. Tujuan-tujuan Berikut akan dicapai:

- 1) Peningkatan prestasi siswa dan institusi Pendidikan baik di bidang akademik dan non-akademis.
- 2) Peningkatan jumlah dan kualitas pendidik
- 3) Peningkatan akses ke pendidikan usia dini dan non formal
- 4) Peningkatan kualitas layanan pendidikan
- 5) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem manajemen sekolah.

Rencana atrategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka telah dibuat untuk mencapai tujuan strategis dan sasaran pada tahun 2023, yang telah diatur dalam rencana Kemendikbud 2020-2024. Rencana strategis ini akan menggunakan berbagai indicator kinerja utama untuk mengukur kinerja program Pembangunan Pendidikan. Rencana ini juga menetapkan parameter keberhasilan untuk masing-masing indicator.

### Program Pekerjaan Tahunan

No	Target Strategis	Indikator hasil	Tujuan
1	Peningkatan Akses Dan Layanan Pmbelajaran Serta Lestarinya konsep Budaya Dan Kearifan Lokal	Jumlah Harapan masa lalu dari Sekolah	13,75%
		Jumlah waktu sekolah rata-rata	9,06%
2	Lestarinya konsep Budaya Dan Kearifan Lokal	Persentase Sanggar Seni Yang Aktif	50,00%

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2023 Kabupaten Kolaka Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran jangka pangjang yang telah ditetapkan akan diukur dengan melakukan perbandingan realisasi dan target kinerja.

Untuk tahun 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka akan menilai hasilnya dengan menggunakan kriteria penilaian yang diuraikan dalam table berikut.

### Perbandingan antara Capaian dan Target Kinerja Tahun 2023

No	Target strategis	Indikator hasil	Tujuan 2023	Selesai
1	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan serta Lestarinya Nilai- Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	Angka Harapan Lama institusi pendidikan	13,75%	3,95 %
		Angka Lama Sekolah rata-rata	9,25%	9,06 %
2	Lestarinya Nilai- Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	Persentase Sanggar Seni yang Aktif	50,00%	52,03 %

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2023 Kabupaten Kolaka

Dari tabel perbandingan antara Capaian Kinerja dan target Tahun 2023 diatas menunjukkan adanya pergerakan dan peningkatan Indikator Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah dari target Renstra 13,75% sementara realisasi sebesar 13,95% dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dari target 9,25% sementara realisasi sebesar 9,06% serta Indikator Kinerja Persentase Sanggar Seni dan Budaya dari target 50.00% sementara realisasinya sebesar 52,03%.

Indikator Kinerja pendukung dalam upaya meningkatkan Angka Lama Sekolah yangantisipasi dan Rata-Rata Lama Sekolah tersebut dilakukan melalui:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana di tingkat Pendidikan Dasar jenjang penddidikan Dasar dan Menengah Pertama serta tingkat pendidikan Pendidikan non formal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 2) Pemberian bantuan operasional di tingkat Pendidikan Dasar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama serta tingkat Pendidikan non

formal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- 3) Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas di tingkat Pendidikan Dasar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama serta tingkat Pendidikan non formal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

## PEMBAHASAN

Laporan mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tahun 2023 menunjukkan tanggung jawab kepala Dinas atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2023. Ketercapaian harus dikomunikasikan kepada Masyarakat dan pemangku kepentingan di dunia Pendidikan sebagai bagian dari pelaksanaan rasa tanggung jawab, dan Amanah.

LKJIP informasi tentang capaian kinerja sasaran strategis dari dua belas program diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Tahun 2023 dijalankan oleh Dinas Pendidikan sejalan dengan janji kinerja tahun 2022.

Restra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 akan menggunakan keberhasilan atau kegagalan tahun pertama untuk merancang program strategis untuk tahun-tahun berikutnya.

Beberapa masalah yang dihadapi oleh sistem Pendidikan termasuk penerapan kurikulum 2013, peningkatan akses ke Pendidikan dari usia dini hingga menengah, peningkatan kualitas Pendidikan dan karyawan, peningkatan kualitas ujian nasional, peningkatan jumlah siswa baru yang diterima, pengendalian uang yang adil dan transparan, dan penyediaan fasilitas Pendidikan.

Kajian pustaka dalam penelitian ini membahas konsep dasar mengenai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), yang mengacu pada kewajiban setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan

dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Teori-teori yang digunakan antara lain konsep akuntabilitas publik, manajemen kinerja sektor publik, serta pengukuran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Konsep-konsep tersebut menjadi dasar analisis dalam memahami bagaimana Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dan digunakan sebagai alat evaluasi kinerja.

Penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa kualitas LAKIP sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain perencanaan strategis yang tepat, kejelasan indikator kinerja, sistem pengumpulan data yang akurat, serta kapabilitas sumber daya manusia. Beberapa studi menyatakan bahwa rendahnya kualitas pelaporan kinerja disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap sistem pelaporan berbasis kinerja dan lemahnya koordinasi antar unit kerja dalam organisasi. Temuan dari penelitian seperti yang dilakukan oleh Azis (2020) dan Afni (2021), menegaskan pentingnya integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja agar laporan yang dihasilkan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan capaian organisasi.

Sementara itu, hasil temuan lapangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka menunjukkan bahwa penyusunan LAKIP telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2014. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, seperti belum sinkronnya indikator kinerja dengan program yang dijalankan, terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan, serta belum optimalnya penggunaan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam hal pengumpulan data kinerja yang valid dan akurat, terutama pada level unit pelaksana teknis.

Dari hubungan antara kajian pustaka, penelitian terdahulu, dan temuan lapangan

tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara teoritis dan empiris, penyusunan dan penggunaan LAKIP memerlukan dukungan sistem yang terintegrasi dan pemahaman yang memadai dari seluruh komponen organisasi. Penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya, sekaligus memberikan gambaran kontekstual mengenai bagaimana LAKIP diimplementasikan secara nyata di tingkat daerah, khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut budaya organisasi, kapasitas manajerial, serta komitmen terhadap transparansi dan efisiensi publik.

Untuk memastikan peningkatan kinerja di masa mendatang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka akan mengambil tindakan strategis tanpa mengubah, menyesuaikan, atau membarui. Dengan pencapaian ini, diharapkan Kabupaten Kolaka akan maju, berkeadilan, dan Sejahtera.

## SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian penulis, dapat disimpulkan realisasi capaian kinerja tahun 2023 menunjukkan bahwa:

1. Angka Harapan Lama untuk Sekolah target pada tahun 2023 adalah 13,75% sementara realisasinya sebesar 13,95%,
2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah target 9,25% sementara realisasinya sebesar 9,06%
3. Persentase Sanggar Seni dan Budaya target 50,00% realisasinya sebesar 52,03%.

Selain itu, keberhasilan mencapai target kinerja tidak terlepas dari upaya keras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka serta dukungan dan partisipasi dari seluruh Masyarakat, baik pelaku usaha maupun Masyarakat umumnya yang terlibat dalam memnuhi program Pembangunan pemerintah.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dimasa depan, hal-hal berikut perlu dilakukan:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) dengan keahlian khusus diharapkan untuk menambah jumlah tenaga kerja yang mungkin kekurangan di bidang pengelolaan data dan laporan.
2. Semua penanggung jawab kegiatan harus dioptimalkan secara berjenjang untuk mempercepat penyelesaian kegiatan dan mengontrol daya serap.
3. Untuk memastikan bahwa biaya yang disediakan sesuai dengan kebutuhan sebenarnya, data indicator harus dianalisis dengan lebih akurat sesuai dengan sebenarnya

## DAFTAR RUJUKAN

- KemenPAN-RB. 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Dan Reformasi Birokrasi Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- Yusrianti, Hasni dan Rika Henda Safitri. 2015. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya* Vol. 13 No.4